

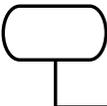
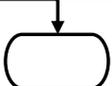


PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62 / 1823 / LUHADUVOK / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Advokasi di Lembaga Peradilan (Gugatan)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.- Peraturan Gubernur Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503/1942/BangProm tanggal 24 April 2018 Tentang Standar Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none">- Memahami peraturan teknis semua jenis perizinan- Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar,- Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan,- Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan,- Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none">- Urusan Pelayanan Perizinan ESDA- Urusan Pelayanan Perizinan INSOS- Urusan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan advokasi tidak sesuai dengan SOP, maka akan mengakibatkan proses advokasi tidak berjalan dengan baik dan sesuai	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Advokasi di Lembaga Peradilan (Gugatan)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Penata Usaha Surat	Tim Penyelesaian Pengaduan	Analisis Hukum	Koordinator Urusan Pengaduan dan Advokasi	Kepala Dinas PMPTSP Jabar	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima Surat Gugatan dari Penggugat melalui Pengadilan terkait permasalahan perizinan							Surat masuk	10 Menit	Surat Masuk dan formulir surat disposisi Kadis	
2	Surat dan disposisi dari Kepala Dinas kepada Koordinator Urusan Pengaduan dan Advokasi untuk segera menyelesaikan permasalahan gugatan di Pengadilan							Surat masuk	10 Menit	Disposisi untuk menyelesaikan gugatan	
3	Memerintahkan Analisis Hukum untuk koordinasi dengan Biro Hukum Setda Jabar.							Surat masuk	1 Jam	Memo Mengenai Perintah Penyiapan Dokumen	
4	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Perizinan dan Biro Hukum untuk membuat jawaban gugatan							Dokumen Bahan Telaahan Rapat	15 Menit	Disposisi Penyiapan bahan telaahan Rapat	
5	Membuat Surat Kuasa Bantuan Hukum ke Biro Hukum dan Pendampingan Advokasi dalam beracara di Pengadilan							Memo Mengenai Perintah Penyiapan Dokumen	2 Hari	Dokumen Bahan Telaahan dan hasil identifikasi kebutuhan dokumen	
6,	Penandatanganan Surat Kuasa Bantuan Hukum dan Pendampingan Advokasi dalam beracara di Pengadilan							Draft Surat Kuasa untuk ditanda tangani	1 Hari	Surat Kuasa melaksanakan Tugas	
7,	Proses beracara di Pengadilan							Alat Bukti	Max 6 Bulan	Putusan Pengadilan	